



PT. BPR ADJI CAKA

JL. LAKS. MALAHAYATI NO. 1G - H TELP. : (0721) 484828 HUNTING (4LINES),
FAX. (0721) 488228 PO.BOX 1048/TK BANDAR LAMPUNG
Email : bpradjicaka@bank-adjicaka.co.id Website : <https://bank-adjicaka.co.id/>

Bandar Lampung, 21 April 2021

No. : B. 0224/BAC/IV/2021

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : **Laporan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Penerapan Tata Kelola
PT. BPR Adji Caka Tahun 2020**

Kepada Yth,

Kepala Kantor Perwakilan

Otoritas Jasa Keuangan Prov. Lampung

Jl. Way Sekampung No. 9 Sumur Batu

Teluk Betung Utara - Bandar Lampung

Dengan hormat,

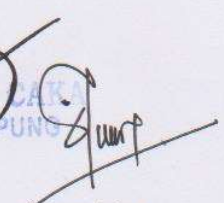
Bersama surat ini kami kirimkan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Penerapan Tata Kelola PT. BPR Adji Caka Tahun 2020.

Mohon dapat diterima dengan baik.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,


Hamrizal Razali
Direktur Utama


Santie
Direktur



PT. BPR ADJI CAKA

JL. LAKS. MALAHAYATI NO. 1G - H TELP. : (0721) 484828 HUNTING (4LINES),
FAX. (0721) 488228 PO.BOX 1048/TK BANDAR LAMPUNG
Email : bpradjicaka@bank-adjicaka.co.id Website : <https://bank-adjicaka.co.id/>

KATA PENGANTAR

Yth.

- PEMEGANG SAHAM PT BPR ADJI CAKA
- OTORITAS JASA KEUANGAN
- DPP PERBARINDO
- MAJALAH MEDIA BPR

Dengan hormat,

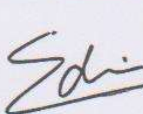
Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT BPR Adji Caka (BPR), maka semakin meningkat risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir.

Bandar Lampung, 15 April 2021

Hormat kami,
PT. BPR ADJI CAKA


PT. BPR ADJI CAKA
BANDAR LAMPUNG

Cornelius Edwin Dastin Halim
Komisaris Utama


Hamrizal Razali
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ADJI JAKA
PER 31 DESEMBER 2020

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT BPR Adji Caka. Selama tahun 2020 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut:

a. RUPS Luar Biasa tanggal 11 Mei 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui Cuti Bapak Hamrizal Razali selaku Direktur Utama dari tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 05 Juni 2020, maka saat Bapak Hamrizal Razali cuti segala Tugas dan Wewenang dalam menjalankan operasional BPR diserahkan kepada Nyonya Santie selaku Direktur;
- 2) Adapun segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dari Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan akan diserahkan kepada Elvilliana Fransisca selaku PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- 3) Dari sisi Likuiditas saat ini seluruh nasabah baik deposito maupun tabungan masih dalam posisi aman, dan tidak ada isu pencairan deposito dalam waktu dekat, BPR juga mempunyai *Maturity Profile* untuk menghitung Likuiditas setiap harinya;
- 4) Dari sisi NPL sudah dibentuk team yaitu terdiri dari M.Sutanto dan Ahmad Sulaiman untuk memonitoring seluruh debitur kredit agar tetap berjalan seperti biasanya dan dibuatkan *action plan* penyelesaiannya untuk debitur NPL.

b. RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juli 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui untuk memperpanjang dan mengangkat kembali Direktur Utama yaitu Tuan Hamrizal Razali untuk periode tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.

Sehingga susunan pengurus PT BPR Adji Caka tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Tuan **Cornelius Edwin Dastin Halim**
2. Komisaris : Tuan **Bambang Wijonarko**

Direksi :

1. Direktur Utama : Tuan **Hamrizal Razali**
 2. Direktur : Nyonya **Santie**
- 2) Semua peserta rapat memberi kuasa kepada Direksi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyetujui untuk menyatakan keputusan rapat ini dihadapan dan kedalam akta notaris.

c. RUPS Luar Biasa tanggal 05 Oktober 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

Menyetujui untuk dilakukan pengambilan deviden PT BPR Adji Caka oleh pemegang saham yang diambil dari Laba ditahan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sudah termasuk pajak deviden, adapun rincian pengambilan sbb :

No	Nama	Deviden yg diambil	Pajak Deviden	Deviden yg diterima
1	Randy Guan 80%	1.120.000.000	112.000.000	1.008.000.000
2	C.Edwin D.H 20%	280.000.000	28.000.000	252.000.000
Total		1.400.000.000	140.000.000	1.260.000.000

d. RUPS Luar Biasa tanggal 14 Desember 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

Menyetujui dan menerima dengan baik rekomendasi Dewan Komisaris untuk menunjuk **Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng, Registered Public Accountants Tax and Management Consultants** Kep - 1365/KM.I/2009 yang beralamat di : Kantor Pusat Jl.Gajah Mada 22 Telp (0274) 514883 Fax (0274) 514883 Yogyakarta 55112 *Website : info.kaphenrysugeng.com* dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan BPR tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

2. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juli 2020 dengan putusan memperpanjang dan mengangkat kembali Direktur Utama yaitu Tuan Hamrizal Razali untuk periode tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2022. Sehingga susunan pengurus BPR dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

Direksi :

1) Direktur Utama : Hamrizal Razali

2) Direktur : Santie

b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan sistem penagihan, perbaikan kompetensi sumber daya manusia BPR dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

3. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Februari 2019 dengan putusan menyetujui pengangkatan Bambang Wijonarko selaku anggota Dewan Komisaris BPR dan Rapat Umum Pemegang Saham

tanggal 05 April 2019 dengan putusan menyetujui untuk memperpanjang dan mengangkat kembali Komisaris Utama yaitu Cornelius Edwin Dastin Halim, maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris BPR per 31 Desember 2020 tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- 1) Komisaris Utama : Cornelius Edwin Dastin Halim
- 2) Komisaris : Bambang Wijonarko

b. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Selama tahun 2020, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- 1) Adanya pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* yang mewabah di dunia termasuk negara Indonesia, kepada Direksi dan karyawan diharapkan untuk tetap tenang, terus tingkatkan Laba perusahaan dengan pemberian kredit tetap berjalan, hanya harus lebih selektif dan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal, tetapi tetap utamakan Likuiditas Bank, menjaga LDR, dan Cash Ratio, serta tingkatkan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah dan menyelesaikan AYDA, usahakan kredit yang berjalan terus dijaga kualitasnya dengan baik sehingga tidak terjadi peningkatan NPL sehingga kedepannya NPL akan bisa turun dan sesuai dengan target yang diharapkan.
- 2) Melaksanakan hasil pemeriksaan OJK sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh OJK, baik untuk perbaikan, rekomendasi atau pembuatan SOP dan lain-lain..
- 3) Memperhatikan dan meningkatkan kewaspadaan risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dikarenakan modal inti BPR belum mencapai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, dan Komite Pemantau Risiko. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan,

Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

II. Kepemilikan Saham Direksi

Komposisi anggota Direksi PT BPR Adji Caka pada periode tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 17 Januari 2018, adalah sebagai berikut:

1. Hamrizal Razali - Direktur Utama (0%);
2. Santie - Direktur (0%).

Seluruh anggota Direksi tersebut di atas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Adji Caka dan perusahaan lainnya.

III. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham

Seluruh anggota Direksi PT BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

IV. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka pada periode tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Cornelius Edwin Dastin Halim - Komisaris Utama (20%);
2. Bambang Wijonarko - Komisaris (0%).

Komisaris Utama mempunyai kepemilikan saham pada PT BPR Adji Caka sebesar 20%, pada BPR lain (PT BPR Nasional Nusantara) sebesar 8%, dan tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Untuk Komisaris tidak memiliki saham pada PT BPR Adji Caka, BPR lain, dan perusahaan lain.

V. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

VI. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya		Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
		Direksi		Dewan Komisaris	
		Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi	2	672	2	247
2.	Fasilitas lainnya *)				
	a. Yang dapat dimiliki	0	0	0	0
	b. Yang tidak dapat dimiliki	2	45	1	5
Total			717		252

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp 2 miliar	0	0
Diatas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	0	0
Diatas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2	0
Rp 500 juta ke bawah	0	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

VII. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1.
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1.
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2 : 1.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 4 : 1.
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 6 : 1.

VIII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2020 adalah 4 (empat) kali.
2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat adalah sebanyak 4 (empat) kali dihadiri lengkap oleh kedua anggota Dewan Komisaris.
3. Topik atau materi rapat sebagai berikut:
 - a. Review pencapaian target RBB dengan realisasi triwulan 1 tahun 2020.
 - b. Laporan Profil Risiko Semester 1 tahun 2020 dan Program APU & PPT.
 - c. Review Perkembangan PT BPR Adji Caka atas hasil pencapaian posisi Juli - September 2020.
 - d. Review pencapaian target RBB dengan hasil pencapaian posisi Oktober - November 2020, pembahasan rekomendasi penunjang akuntan publik untuk periode pemeriksaan tahun 2020, dan pembahasan penyusunan RBB tahun 2021.

IX. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama periode tahun 2020 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan *outsourcing*), sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
dalam 1 tahun	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan	Tahun sebelum nya	Tahun laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

X. Permasalahan Hukum yang Dihadapi BPR

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian adalah sebagai berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

XI. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

- *) - Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama dan jabatan pengambil keputusan.

Selama periode tahun 2020 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

XII Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT BPR Adji Caka selama tahun 2020 antara lain adalah:

1. Pemberian sumbangan pembangunan Musholla Al-Ikhlas Teluk Betung Bandar Lampung, dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Februari 2020;
2. Pemberian bantuan dana kepada Youtube Cawo Ekam untuk acara membudayakan aksara Lampung sebagai wujud kecintaan terhadap budaya Lampung, dengan total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2020.

XIII Kesimpulan Umum *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG BPR, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG BPR memperoleh peringkat 1,61 atau **“Sangat Baik”**. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Telah diangkat Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan BPR, yang telah mendapat persetujuan OJK, diharapkan penerapan GCG ke depan akan lebih fokus dan terarah.
2. Membuat kebijakan, sistem & prosedur penanganan benturan kepentingan
3. Membuat kebijakan, sistem & prosedur mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.
4. Membuat program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BPR.
5. Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan baru pada seluruh jenjang organisasi BPR.
6. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR Adji Caka dengan alamat *www.bank-adjicaka.co.id*.

**TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Sudah terima dari : BPR ADJI CAKRA
R. 0224/BAC/IV/2021
Uraian Dokumen : 1. Akta Rapan Tata Kelola
Jumlah : 1 (Satu) Lembar
Jenis Dokumen : Asli/Tembusan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : 7. NIKOTI PT. PROV. LAMPUNG C

Yang menerima,

No. Agenda Unit Kearsipan :
Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :

Yang menerima,

21. 04. 2021
Yang menyerahkan,

Yang menyerahkan,